

Judul : PMI korban online scam: tangkap jaringan pengirim pekerja
Tanggal : Minggu, 26 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

PMI Korban Online Scam Tangkap Jaringan Pengirim Pekerja

SENAYAN menyoroti kasus Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja yang menjadi korban penipuan dan eksploitasi perusahaan online scam atau penipuan daring. Pemerintah diminta menindak tegas jaringan komplotan itu di Indonesia.

Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mendesak aparat penegak hukum membongkar dan menangkap jaringan pengiriman pekerja online scam di Kamboja. Peralunya, kasus WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara tetangga itu bukan hal baru.

"Pekerjaan yang melibatkan aktivitas online scam jelas melanggar hukum dan merugikan banyak pihak, baik di Indonesia maupun di negara lain," ujar Oleh dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Diketahui, pada 17 Oktober 2025, 110 WNI mencoba kabur dari sindikat online scam di Kamboja setelah ditipu sindikat dengan iming-iming kerja di Malaysia. Mereka berusaha melarikan diri dari perusahaan online scam setelah menjadi korban penipuan. Banyak dari mereka awalnya dijanjikan pekerjaan yang layak, tapi ternyata dijadikan pekerja paksa dalam aktivitas penipuan online lintas negara.

Oleh meminta Pemerintah segera memperkuat langkah pencegahan. Tujuannya, agar tidak ada lagi WNI yang diberangkatkan untuk bekerja di Kamboja secara ilegal, apalagi dalam bidang penipuan online.

Terlebih kata dia, Pemerintah tidak memiliki perjanjian kerja sama resmi pengiriman pekerja migran dengan Pemerintah Kamboja. "Jadi, semua perekrutan ke sana jelas ilegal dan berisiko tinggi," tegas politikus PKB ini.

Selain itu, Oleh meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kementerian Tenaga

Kerja (Kemenaker), serta Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), untuk memperkuat koordinasi dalam penanganan dan pemulihan para korban.

Ia menambahkan, langkah perlindungan dan edukasi terhadap calon pekerja migran juga harus diperkuat. Tujuannya, agar masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri tanpa jalur resmi. "Pemerintah harus hadir dan melindungi warganya," tandasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengaku prihatin dengan temuan kasus korban TPPO di sejumlah negara termasuk Kamboja. Apalagi, para korban berasal dari kalangan Gen Z hingga individu berpendidikan tinggi dengan lulusan kuliah S2 atau Magister.

"Kami mendorong ada Satuan Tugas (satgas) khusus pembongkaran jaringan TPPO berbasis digital, dengan dukungan teknologi, intelijen dan kerja sama internasional," kata Dave dalam keterangannya, Sabtu (25/10/2025).

Menurutnya, temuan kasus itu menjadi alarm keras perdagangan orang menyusup melalui saluran digital hingga tawaran kerja yang tampak kredibel. Pihaknya meminta ada evaluasi sistem perlindungan tenaga kerja digital.

Sehingga pendekatan perlindungan tidak bisa lagi bersifat reaktif. "Kita membutuhkan sistem deteksi dini yang mampu mengenali pola rekrutmen, jalur migrasi, dan potensi eksploitasi sejak dari hulu," kata politikus Golkar ini.

Untuk itu, Dave mendorong Kemlu memperkuat pemetaan risiko terhadap negara tujuan. Termasuk melakukan kampanye dalam upaya memerangi penipuan daring yang digencarkan oleh Pemerintah. ■ TIF